

B A B III

KONSEPSI NEGARA SEKULER

A. Penerapan Konsep Negara Sekuler.

1. Pengertian Negara Sekuler

Term "negara sekuler" berasal dari dua kata "negara" dan "sekuler". Istilah negara sebagaimana disebutkan dalam bab II, mengandung arti status atau statum yang sekarang lazim disebut "konstitusi". Istilah "sekuler" dalam pengertian etimologis berasal dari kata "saeculum" yang berarti mengandung konotasi waktu dan lokasi (Al-Attas, 1981 :18). Dimensi waktu menunjuk pada pengertian masa kini atau zaman kini dan lokasi menunjuk pada pengertian duniawi. Jadi pengertian Saeculum menunjuk pada peristiwa-peristiwa di dunia ini pada masa kini atau zaman kini. Atau dengan pengertian lain makna sekuler lebih ditekankan pada waktu atau periode tertentu di dunia ini yang di pandang sebagai suatu proses sejarah.

Dalam bahasa Arab, istilah sekuler tersebut diterjemahkan dengan "alamani" dari "alam" (dunia) yang maknanya adalah duniawi, yang dilawankan dengan selain dunia atau spiritual. Pada masa sekarang, istilah tersebut divokalkan lagi dengan istilah baru "ilmani" yang dipahami dalam arti ilmiah, dari kata

"ilm" (pengetahuan atau sains) yang dilawankan dengan religius. Istilah "ilmani" ini digunakan oleh Muhammad Qutb yang dikutip oleh Pardoyo dalam bukunya "sekularisasi dalam Polemik" (Pardoyo, 1993:78). Dalam dunia Islam istilah sekuler ini pertama kali dipopulerkan oleh Zia Gokalp (1876-1924) sosiolog terkemuka dan teoritikus nasionalis Turki. Istilah ini sering dipahami dalam pengertian irreligius atau bahkan anti religius.

Dalam pengertian terminologi, term sekuler dideskripsikan oleh Pardoyo bahwa "sekuler" diartikan sebagai pertentangan antara masalah agama dan non agama, (*worldly not religious or spiritual*) tidak bersifat religius atau spiritual/duniawi. (Pardoyo, 1993:19)

Sedangkan Muhammad Al Bahiy mengartikan term "sekuler" (= dunia) berarti suatu sistem, prinsip-prinsip dan penerapan-penerapan yang menolak segala bentuk keimanan dan ibadah kegamaan; keyakinan bahwa agama dan soal-soal ketuhanan itu tidak semestinya ikut campur tangan dalam urusan negara (Al-Bahiy, 1985:18).

Muhammad Thahir Azhari mengartikan "sekuler" sebagai kata sifat yang menunjuk pada suatu keadaan yang telah memisahkan kehidupan duniawi dari pengaruh agama atau hal-hal yang gaib, sehingga terjadi suatu dikotomi antara kehidupan profan dengan kehidupan sakral (Azhar, 1992:15).

Dari paparan diatas, dapat ditarik suatu pandangan bahwa "Negara Sekuler" adalah negara yang tidak memberikan peran pada agama dalam pemerintahan (worldly) dengan menolak suatu sistem, prinsip-prinsip dan penerapan penerapan segala bentuk keimanan dan ibadah keagamaan (spiritual), sehingga terjadi dikotomi antara kehidupan profan dengan kehidupan sakral.

2. Proses terbentuknya Negara Sekuler

Dalam catatan sejarah, kontak soaial antara dunia Islam dengan dunia barat (Eropa) telah terjalin sejak lahirnya Islam abad ketujuh Masehi yang berekspansi dengan cepat hingga mencapai; Yodania, Palestina, Syria, Irak dan Mesir, yang ketika itu berada dibawah kekuasaan dinasti Bizantium yang berpusat di Eropa. Dalam waktu yang bersamaan pula, kerajaan Persia dapat di taklukkan oleh Islam.

Di daerah-daerah Bizantium dan Persia telah berkembang peradaban Yunani yang dibawa oleh ekspansi Alexander Yang Agung pada abad ke-empat segelum Masehi. Pada masa itu pengaruh peradaban terbesar di kerajaan Bizantium adalah agama Nasrani yang menjadi agama resmi negara. Sementara di Persia adalah sakralisasi alam dalam artian penyembahan terhadap alam, seperti api, udara, cahaya, batu-batuan, langit, udara dan sebagainya yang dianggap memiliki kekuatan gaib.

Perhubungan diantara dua peradaban ini yakni Yunani dan Islam telah memberi konstelasi yang baru bagi perkembangan pemikiran rasional dan ilmiah, sehingga pada akhirnya membawa kemajuan Islam dalam bidang filsafat dan sains pada zaman klasik (650-1250 M). Revolusi pemikiran ini telah menghantarkan Islam pada peradaban tertinggi dan tiada taranya pada zaman itu. Sejarah mencatat bahwa pada masa itu umat Islam telah melahirkan lebih kurang tiga ratus macam ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang.

Dalam pada itu Islam juga mengadakan ekspansi ke dunia barat, sehingga menguasai seluruh Afrika Utara, dari sana kemudian menyeberang ke Spanyol dan Sisilia di Italia. Dalam kontak ini Islam telah masuk ke daerah Eropa sendiri, sehingga tidaklah mengherankan jika orang-orang dari; Perancis, Inggris, Italia dan lainnya berdatangan ke pusat-pusat peradaban Islam yang berada di Eropa, seperti; Cordova dan Seville di Andalusia dan Palermo di Sisilia. Mereka melakukan transformasi besar-besaran terhadap pemikiran filosofis, rasional dan ilmiah Islam ke Eropa. Sains Islam juga turut mereka bawa ke dunia barat.

Transformasi dan pengembangan pemikiran Islam yang di bawa ke dunia Barat tersebut, pada mulanya tidak dapat diterima begitu saja. Sebab pemikiran-pemikiran filosofis yang dikembangkan di dunia barat berbenturan dengan Institusi-institusi atau dogma-dogma gereja Katolik. Gereja katolik mendominasi segala segi kehidupan, termasuk bidang

ilmu pengetahuan.

Otoritas dogmatis gereja yang mengeluarkan pernyataan bahwa "kebenaran mutlak adalah kebenaran Al-Kitab", secara perlahan pernyataan ini mulai susut dan bahkan diragukan setelah masuknya pemikiran filsafat Ibnu Rusd yang menyatakan bahwa "kebenaran ada dua, yaitu kebenaran wahyu dan kebenaran akal". Apalagi setelah masuknya abad pertengahan zaman Renaissance yang mana perhatian mulai ditujukan kepada berfikir rasional ilmiah serta filosofis dengan meninggalkan dogma-dogma yang sebelumnya mereka pegang kuat.

Pemikiran Renaissance mulai mencapai tingkat kedewasaannya setelah abad ke 17 yang didominasi pemikiran-pemikiran Rasionalisme yang menekankan Rasio sebagai pengetahuan ilmiah, sebagai tokohnya Rene Deskartes (1596-1650) yang dikenal sebagai bapak filsafat modern dan pemikiran empirisme yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan Ilmiah, yang dipelopori oleh John Locke (1632-1704).

Aksi reformasi ini yang dipelopori para sarjana Renaissance diantaranya Nicolo Machiavelli (1469-1532) yang mendorong semangat Renaissance hingga melahirkan agama baru Protestan, sebagai akibat dari sikap katolik yang tidak menetralkan perkembangan-perkembangan science. Pengaruh Renaissance sebagai buah dari pemikiran rasionalisme dan empirisme telah mencapai puncaknya pada abad ke 18 sebagai zaman Aufklarung (pencerahan) yang dipengaruhi sekali oleh

ilmu pengetahuan alam dan Issac Newton (1642-1727) yang memberi alas kepada fisika klasik, hukum-hukum fisika ini kemudian diterapkan pada ilmu pengetahuan lainnya. (sakralisasi alam). Pada periode ini abad ke-17 dan ke-18, Muhammad Al Bahiy menyebutnya sebagai periode sekularisme moderat (di kutip dalam Pardoyo, 1993:76).

Pada akhirnya ideologi sekuler akan membawa orang ke puncak sekularisasi dengan mengaktualisasikan alam (meng gali potensi alam sebesar-besarnya) sebagai akibat dari kristalisasi sekularisme. Sebagai sikap klimaks aksi Protestantisme mencapai bentuknya nampak jelas pada pernyataan Friedrich Nietzsche sebagai dampak dari krisis agama dan theologi, bahwa "Tuhan telah mati". Kondisi ini mendorong beberapa teolog Kristen terutama dari kalangan Protestan untuk meletakkan dasar teologi baru di atas puing reruntuhan yang didalamnya telah terkubur theologi Kristen tradisional (Katolik) dan yang didalamnya akan di bangun kembali Kristen baru yang telah tersekulerkan. Gerakan inilah yang pada akhirnya di kenal dengan "gerakan Protestantisme", yang dengan wajah ambivalensinya (pertentangan) mengatakan bahwa sekularisasi mempunyai akar-akarnya dalam kitab Injil. Mereka mencarikan "Legitimation proof" bagi pendapatnya yang di dalam Injil tertulis :

"Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah". (Matius, 22;21 dan Rum,13;7)

Ayat inilah yang mereka interpretasikan secara paksa guna koverisasi (menutupi) atas kelemahan atau ketidak-mampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Pada periode ini, abad ke 19 dan ke 20 yang dianggap sebagai periode materialisme atau sebagai revolusi sekuler yang dipelopori oleh Ludwig Feuerbach (1804-1872) menurut pendapatnya sebagaimana di kutip Pardoyo ;

"manusia dapat mengkaji periode perpindahan dari agama alamiah yang bersih dan jauh dari pengaruh agama langit menuju materialisme ekstrem. Manusia itu merupakan wujud Tuhan tetapi bukan Tuhan dan agama yang baru adalah politik bukan agama masehi. Karena itu politik harus dijadikan agama. Allah dan agama keduanya adalah bukan dasar negara tetapi dasarnya adalah manusia dan kebutuhan. dengan begitu agama menjadi musuh negara, dan ateis praktis ada berkaitan dengan agama". (1993:35)

Pernyataan ini selanjutnya disempurnakan oleh marxisme (1818-1883) dan Leninisme (1870-1924) dengan dukungannya ; bahwa ; Agama tidak ada nilainya bagi penduduk, maka tidak perlu menanyakan aliran agama, dan kenetralan terhadap agama itulah pemisahan yang sempurna antara negara dan gereja. Dan pada periode ini menurut Muhammad Al Bahiy menyebutnya sebagai periode sekeluarisme ekstrim sebagai tindak lanjut bagi pemikiran filosofis sekuler periode pertama., (Pardoyo, 1993:36).

Bagaimanapun sekularisme yang masih menerima Tuhan hanya merupakan satu langkah awal menuju sekularisme tak

bertuhan. Fakta ini nyata sekali di sokong oleh perjalanan seajarah, sebagai contoh ketika Kristen datang ke-Eropa, kerajaan Kristen yang muncul berwatak non sekuler sesungguhnya ia bersifat teokratis. Kemudian tiba saatnya fungsi negara dan gereja di pisahkan sampai akhirnya negara Kristen disekulerkan. Sekularisme ini berangsur-angsur melemahkan kekuatan-kekuatan agama dan moralitas yang masih terus berlangsung, dalam waktu yang bersamaan anak sekularisme lahir dalam bentuk komunisme. Sekularisme yang masih menerima Tuhan akhirnya digulingkan oleh sekularisme yang membenci Tuhan. Karl Marx yang meletakkan dasar komunisme menyeret hidung sekularisme dan mengangkatnya mencapai puncak alaminya yaitu materialisme yang disebutnya sebagai materialisme ilmiah. (Haidar Baqir, 1993:127).

Realitas sejarah telah berbicara lain, dunia barat (Eropa) yang semula berada di bawah peradaban Islam, kini telah mencapai puncak peradaban tertinggi, yaitu zaman modern yang membawa masyarakat Eropa ke puncak materialisme. Pada saat yang bersamaan pula justru Islam yang mengalami degradasi peradaban. Islam di zaman pertengahan (1250 - 1800 M) mengalami kemunduran dalam segala bidang. Hanya dalam bidang politik saja Islam mengalami kemajuan sementara, yaitu masa kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas daerah kekuasaannya di eropa timur sampai ke Austria, Semenanjung Balkan, Maroko, Libia dan beberapa daerah lain. Dunia barat sekarang melakukan penetrasi (penyerapan) jauh

ke dunia Islam. Dalam penetrasinya, dunia barat menggelar kekuatan politik militer hingga seluruh negara yang dulu berada di dalam kekuasaan Islam, sekarang dalam pelukan orang-orang barat. Hanya beberapa daerah saja yang masih dikuasai Islam seperti Turki, Arab Saudi, Yaman, Iran dan Afganistan. Tidak hanya sampai di situ penetrasi orang-orang Barat, mereka memasok pemikiran-pemikiran baru, sains dan teknologi modern. Dunia Barat yang dulu di pandang rendah oleh Islam sebagai dunia yang berperadaban rendah yang bergelimang kebodohan, kini telah membangun singgasana yang jauh lebih hebat bila di bandingkan dengan singgasana yang pernah di bangun oleh Islam.

3. Sistem dan Bentuk Negara Sekuler

Dalam mengaktualisasikan sistem dan bentuk negara sekuler itu sendiri memang memerlukan studi khusus, mengingat rumitnya proses sekularisasi itu sendiri. Hal ini dilihat dari cepatnya sekularisasi merambah negara-negara yang tidak kuat ideologis kenegaraannya, sementara tuntutan modernisasi menjadi sesuatu yang musti dalam masyarakat modern, sebagai akibatnya menurut Smith, setiap modernisasi tanpa kecuali akan mengalami proses ke arah sekularisasi dan itu pasti terjadi. Yang mana proses sekularisasi ini mulai menacari sistem dan menemukan bentuknya melalui modernisasi.

a. Sistem Negara Sekuler

Secara garis besar sistem negara sekuler menurut Donald Eugene Smith ditandai dengan beberapa probabilitas :

- 1) Pemisahan (separasi) antara pemerintahan dengan ideologi keagamaan dan struktur-struktur kegerejaan,
- 2) Pengembangan (ekspansi) pemerintah untuk mengatur lapangan sosio ekonomis yang dulu dilakukan oleh struktur-struktur keagamaan dan,
- 3) Transvaluasi budaya politik untuk menekankan tujuan-tujuan duniawi yang non transenden dan cara-cara rasional dan pragmatis yang berupa nilai-nilai politik sekuler. (Smith, 1985:115)

Tiga aspek sekularisasi diatas masih bersifat umum dalam pembangunan pemerintahan modern, untuk itulah Berger sebagaimana di kutip oleh Pardoyo dalam bukunya "Sekularisasi dalam Polemik" membatasinya pada dua konsep tentang sekularisasi :

- 1) Sekularisasi Subyektif, diterapkan pada tingkat kesadaran,
- 2) Sekularisasi Obyektif, yang diterapkan pada sosio-kultural.

Secara subyektif manusia sehari-hari cenderung menjadi tidak pasti dalam hal ritualitasnya. Secara obyektif manusia sehari-hari berhadapan dengan berbagai pelaku re-

ligius dan pelaku lainnya yang bersaing untuk mendapatkan perhatiannya atau untuk memaksanya patuh (Pardoyo, -1993:71).

Berdasarkan analisis di atas, Berger nampak melihatnya dari segi sosiologis fenomena religius dalam melakukan ibadah keagamaan, sebagai bukti bahwa sekularisasi telah mempengaruhi manusia sehari-hari sebagai suatu krisis penalaran dalam hal keagamaan. Dengan kata lain sekularisasi telah mengakibatkan keruntuhan kesadaran pada tingkat sosio-kultural (Subyektif, obyektif)

Sedangkan pada sisi ekonomi, proses sekularisasi condong menghantam agama habis-habisan bahkan melenyapkan agama sama sekali dan menggantinya dengan agama-agama baru, agama materi sebagai akibat dari eksploitasi material sebebas-bebasnya. Sebagaimana apa yang dikatakan Lenin, "agama baru telah tumbuh, sebagai ganti agama masehi". Pernyataan Lenin yang mensakralkan alam telah melenyapkan Tuhan sama sekali dari alam ini dan bahkan dari hati mereka dengan pemujaan terhadap materi.

Kemakmuran materiel di dunia ini pula yang menjadi asumsi dasar sekularisme dan menjadi alat satu-satunya dalam mencapai kemandirian materiel yang didambakan. Ketika masyarakat sekuler memasuki puncak kemakmuran, maka efisiensi baginya adalah nilai-nilai bendawi semata yang

satu-satunya tujuan. Dari sini sekularisasi menjadi seperti apa yang di ungkap Vernan Pratt :

"Ciri dari ekonomi modern yang bergerak tanpa banyak perhatian terhadap agama, etika dan estetika atau perimbangan prestis, Orientasi dasarnya harus kepada keuntungan sebesar-besarnya. Dalam setiap sistem sosial, politik, atau ekonomi, ekonomi modern harus mematuhi prinsip-prinsip ini ciri dasarnya adalah kesanggupan untuk dapat berkembang sendiri". (Rifyal Ka'bah, 1984:97)

Sedangkan Harvey Cox menyebutkan dengan tegas ciri masyarakat sekuler atau negara sekuler sebagai manusia sekuler dengan sifat pragmatisme, profanity, tolerance dan plurality. Dengan "Pragmatism" ia maksudkan bahwa perhatian manusia sekuler hanya terpusat kepada pertanyaan "Apakah ini bisa jalan?" (Does it work?) Manusia sekuler tidak menyibukkan dirinya dengan mitos atau misteri. Ia sangat mengabaikan sesuatu yang kelihatannya tidak dapat di ukur oleh otak manusia. Ia memberikan penilaian terhadap sesuatu itu berdasarkan tujuan yang hendak di capai secara praktis. Untuk itu ia melihat alam bukan sebagai suatu sistem metafisika yang unik tetapi sebagai suatu deret problema dan proyek.

Sedangkan "Profanity" dimaksudkan dengan segi keduniaan dari manusia sekuler keseluruhannya. Ia melihat alam dengan bahasa alam itu sendiri bukan dari alam yang lain.

Mengenai "Plurality dan Tolerance" Cox menyebut bahwa manusia sekuler dalam masyarakat atau negara sekuler, selalu berfikir tentang dunia dalam berbagai opini termasuk

berbagai opini agama dapat hidup rukun dan damai tanpa jiwa fanatik buta terhadap agama (Rifyal Ka'bah, 1984:95).

Dari apa yang telah dideskripsikan di atas maka negara sekuler sebagai negara yang tidak mengakui eksistensi agama dan bahkan menafikannya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Negara Sekuler membuat pemisahan (separasi) antara urusan negara menjadi urusan negara dan urusan agama menjadi urusan gereja. Separasi ini dalam dunia Barat telah melahirkan dikotomi dengan pernyataan bahwa : "Kalau ingin menjadi agamawan janganlah menjadi ilmuwan, dan kalau menjadi ilmuwan janganlah menjadi agamawan".
- 2) Negara sekuler membangun dunia ini tanpa fundasi sendi sendi agama, dan memandang dunia ini dengan bahasa alam itu sendiri (profanity).
- 3) Negara sekuler secara subyektif memisahkan atau bahkan menghilangkan sama sekali aktifitas ritual dan menggantinya dengan aktifitas material semata. Sedangkan secara obyektif pada tingkat yang lebih luas negara sekuler telah meruntuhkan nilai-nilai religiositas yang ditandai dengan krisis penalaran dalam hal keagamaan sehingga mengakibatkan kejatuhan (deklinasi) kesadaran beragama dalam scope sosio-kultural.

b. Bentuk-bentuk Sekularisasi

Di era urbanisasi agama ke arah materialis individualistik sebagai suatu fenomena agama baru, telah menimbulkan gejolak-gejolak sosial antara yang anti terhadap agama dan orang-orang yang fanatik terhadap agamanya. Pembangunan kemandirian materiel sebagai agama baru telah menimbulkan fenomenologis sosio-kultural pada masyarakat yang masih tinggi nilai religiositasnya. Sebagai dampaknya sekularisasi tidak dapat dielakkan dengan pilihan modernisasi. Sebab secara filosofis, sekularisasi bisa berarti proses sosial politik menuju sekularisme dengan implikasinya yang kuat yaitu : adanya pemisahan secara total antara kekuasaan negara dengan kekuasaan agama.

Pendekatan sosio-religius yang dimaksudkan disini adalah proses dalam bentuk-bentuknya sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter E. Glasner (Glasner, 1992 :23) berikut ini :

1. Basis Institusional

Bentuk-bentuk sekularisasi pada basis institusional ini mempunyai empat tipe ;

a) Deklinasi (kejatuhan), yang dimaksudkan oleh Glasner adalah kejatuhan religi yang disertai pula

oleh manifestasi institusionalnya. Dalam sejarah kristen barat proses sekularisasi dalam bentuk deklinasi nampak pada tumbangannya dominasi kekuasaan oleh gereja katolik yang memegang kendali religius saat itu. Masyarakat Kristen barat telah mengalami krisis agama dan teologi sebagai akibat sekularisasi. Klimak dari adanya gejolak peradaban masyarakat kristen Barat adalah munculnya statement seorang filosof penyair Jerman, Friedrich Nietzsche yang mengatakan bahwa "Tuhan telah mati". Tentu saja apa yang dimaksudkan Nietzsche dengan pernyataannya tak lebih sebuah kidung bahwa kristen telah mati, karena nilai-nilainya telah ditanggalkan. Runtuhnya dominasi Kristen Katolik ini, akhirnya melahirkan gerakan baru pada masyarakat kristen barat, yaitu gerakan Protestantisme dengan wajah ambivalensinya mengatakan bahwa sekularisasi mempunyai akar-akarnya dalam kitab Injil dan merupakan buah ajaran Injil.

b) Rutinisasi, yaitu proses sekularisasi yang cenderung menghilangkan karakteristik-karakteristik sosio-etis dan mendesakralisasikannya. Proses ini melahirkan pandangan desakralisasi terhadap institusi-institusi atau lembaga-lembaga religius, sehingga fungsinya beralih semata-mata duniawi.

c) Deferensiasi, yaitu proses sekularisasi yang membedakan antar komunitas sosial dan komunitas religius. Pada perkembangannya, proses ini cenderung mengarah kepada

pemisahan sistem kelembagaan antar pemerintah dan agama. Dan secara perlahan pemerintah mengurangi pengaruh agama, hingga pada akhirnya melakukan rekonstruksi pranata-pranata sosial tanpa dasar agama. Fenomena semacam ini telah pernah terjadi di Perancis, Rusia, Cina dan lain-lain.

- d.) Disengagement (keterlepasan), yaitu keterlepasan pranata-pranata sosial dari nilai-nilai religius. Keterlepasan ini bukan hanya dapat terjadi dalam bingkai struktural, namun juga dapat terjadi dalam bidang kultural. Dalam proses ini, nilai intrinsik dunia pada mulanya diakui dalam segala bidang dan pada akhirnya mendapatkan otonomi absolutnya yang sama sekali lepas dari religi. Fenomena sosial ini nampak jelas pada masyarakat Perancis tahun 1832, dimana pelajaran religius di sekolah-sekolah negeri di hapus dan di ganti dengan pelajaran-pelajaran etika umum. Dan pada akhirnya tahun 1904 seluruh institusi religius di larang untuk memberikan segala bentuk pelajaran.

2. Basis Normatif

Proses sekularisasi pada basis normatif ini mempunyai empat tipe :

- a) Transformasi, yaitu mentransformasikan nilai-nilai religius yang transendent kepada nilai-nilai duniawi yang

transendent kepada nilai-nilai duniawi yang utilitarian. Pada masyarakat Barat tipe sekularisasi ini telah melahirkan kapitalisme modern, yang mendorong seorang yang telah tersekularis untuk lebih cenderung kepada nafsu-nafsu duniawi yang murni dan melepaskan diri dari makna religius dan etis. Sebagai contoh simpelnya adalah timbulnya protestantisme pada masyarakat Kristen Barat yang membawa kebebasan individual dan kemerdekaan berfikir. Ide kemerdekaan ini mengakibatkan berkembangnya suatu sistem negara yang otonom. Meskipun pada awalnya administrasi yang tumbuh masih dipengaruhi oleh akar-akar gereja katolik. Troeltsch, sosiolog Jerman telah mengidentifikasi tanda-tanda transformasi etika religius dalam lingkup hukum, keluarga, perkawinan dan seks. Terpisahnya rasa-rasa sensual dari pemikiran dosa merupakan pengaruh sekularisasi transformasi.

- b) Generalisasi, yaitu menempatkan nilai-nilai religius dalam sistem kultural dan semua nilai kemasyarakatan secara analitik tidak difahami sebagai dasar religius. Tipe sekularisasi ini sebagian besar berasal dari diferensiasi yang telah disebutkan dahulu. Namun di sini tidak ditekankan kepada pengaruh diferensiasi sosial yang dipandang dari segi aspek-aspek institusional masyarakat, akan tetapi pada pengaruh umum norma-norma dan nilai-nilai yang dipegangi secara bersamaan oleh masyarakat. Menurut Bellah (1967), dimensi religius

publik diungkapkan dalam seperangkat kepercayaan, simbol simbol dan ritual-ritual kemasyarakatan.

- c) Desakralisasi, yaitu pelepasan nilai-nilai super-natural atau watak-watak sakral dari obyek-obyek yang sakral, atau pembebasan manusia dari nilai-nilai agama dan segala macam metafisika, dalam arti terlepasnya agama dari nilai-nilai religius. Tipe sekularisasi ini memberikan keyakinan kepada manusia bahwa manusia dapat hidup dan berjalan langgeng hanya dengan mengandalkan rasionalitasnya. Pada sisi lain desakralisasi ini sangat erat kaitannya dengan rasionalisasi, atau lebih tepatnya dengan rasionalisme. Karena rasional inilah yang akan menggantikan peranan dan fungsi religius atau sakrament tadi secara total dan menyeluruh. Pada masyarakat modern saat ini, desakralisasi telah menutup pandangan atau setidaknya mengaburkannya terhadap tujuan-tujuan Tuhan dalam ciptaannya. Dengan tanpa malu-malu manusia berbuat menurut kehendaknya atas ciptaan-Nya tanpa mampu memberi refleksi balik kepada pencipta-Nya.
- d) Sekularisasi, antara sekularisasi dengan desakralisasi mempunyai titik singgung yang sama, yaitu keduanya mengandung maksud pembebasan atau keterlapanan. Sekularisasi berarti terlepasnya atau pembebasan dunia dari otoritas religius. Begitu pula desakralisasi dimaksudkan sebagai penghapusan atau pembebasan dunia dari legitima

si sakrament. Sekalipun keduanya mempunyai titik singgung yang sama, namun ada perbedaan antar keduanya yaitu sekularisasi mempunyai sifat antagonis atau dikotomis yang lebih tajam terhadap otoritas religius dari pada desakralisasi. Dalam pandangan mayoritas pemikir barat dan timur, sekularisasi ini merupakan proses yang akan mengantarkan kepada pintu sekularisme. Hal ini disadari karena dua alasan pokok yaitu dengan meninjau latar belakang semantik dan historis.

3. Basis Kognitif.

Pada basis ini akan dilukiskan suatu tradisi sosiologi yang cukup koheren dan khas, guna untuk memudahkan pengidentifikasian terhadap penggunaan istilah sosiologi sekularisasi, Proses sekularisasi pada basis ini mempunyai dua tipe :

- a) Segmentasi, yaitu menginternalisasikan bentuk-bentuk sosial religius yang telah terdeferensiasi ke dalam moral umum. Proses internalisasi bentuk-bentuk sosial yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, apabila terjadi hubungan yang harmonis antara pandangan dunia resmi yang obyektif dengan realitas yang subyektif. Proses ini akan menyatakan secara tidak langsung suatu identitas paripurna antara lembaga-lembaga religi dan lembaga-lembaga sosial lain

nya dalam pandangan dunia yang umum.

b.) Sekularisasi, pengertian ini masih merujuk kepada pengertian sebelumnya. Hanya saja proses sekularisasi pada basis kognitif ini lebih disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan sosial atau ketidakpuasan masyarakat atas situasi dan kondisi yang mengelilinginya. Menurut ; **Glasner**, proses sekularisasi pada basis ini di topang oleh tiga kecendrungan perubahan pokok sosial yang saling berhubungan, yaitu : Urbanisasi, Industrialisasi dan modernisasi.

Dalam pengamatan para sosiolog, urbanisasi merupakan causa prima lahirnya industrialisasi dan modernisasi. Urbanisasi adalah ekspresi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap aksentuasi alamiah, dan mendorongnya menuju akselerasi ilmiah. Revolusi sosial ini berimplikasi pada perubahan bentuk-bentuk religi yang tradisional, yang dianggap sebagai suatu variabel yang dependen. Sebagaimana yang dikatakan Peter E. Glasner ;

"Implikasinya, bentuk-bentuk religi yang tradisional haruslah berubah sebagai akibat "logika" yang menganggap religi sebagai suatu variabel yang dependent". (Glasner, 1992:93)

Revolusi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam sejarah perkembangan masyarakat manusia, dan telah mampu menciptakan puncak peradaban tertinggi, yaitu era-industrialisasi dan modernisasi yang bertahakan rasio.

nalitas yang tinggi. Sebagaimana Peter L. Berger menggambaran ;

"Suatu masyarakat industri dan modern, menuntut munculnya beberapa kader personil yang ilmiah dan tehnik; dimana organisasinya memberi latihan dan tanpa henti mengisyaratkan suatu rasio nalitas yang tinggi, tidak hanya pada tingkat infrastruktur akan tetapi juga pada tingkat kesadaran". (Glasner, 1992:94)

c. Basis-basis Sekularisasi.

Sasaran-sasaran sekularisasi para sekularis dalam melancarkan aksinya tidak saja pada aspek ekonomi saja melainkan seluruh sendi-sendi kehidupan yang dapat melumpuhkan ortodoksi doktrinal, seperti sekularisasi bidang hukum, pendidikan, struktur masyarakat, dan juga sekularisasi bidang politik. Sekularisasi ini telah mengakibatkan merosotnya nilai-nilai kemanusiaan akibat nilai-nilai yang selama ini di pegang kuat dan bahkan di junjung tinggi perlahan-lahan mulai dilunturkan dari nilai azalnya dan bahkan dicampakkannya sama sekali .

Dan memang inilah yang dikehendaki oleh para sekularis. Adapun basis-basis itu sebagaimana yang di paparkan oleh Donald Eugene Smith (1985:130) sebagai berikut :

1) Sekularisasi Hukum.

Proses sekularisasi ini telah berjalan lama dan berliku-liku, mulai abad ke. 15 muncul di Eropa yang Katolik, tetapi baru pada abad-abad ke 18 dan 19

menyebarkan keberbagai negara, termasuk dunia Islam. Tidak luput dari sekularisasi ini. Hanya dalam hukum keluarga saja yang masih dapat bertahan dari pengaruh sekularisasi.

Amerika pada zaman kolonial Spanyol tahun 1795 mulai mengurangi yurisdiksi pengadilan di bidang kriminal dan diperiksa oleh pengadilan-pengadilan umum. Hak istimewa gereja juga dihapuskan di Argentina tahun 1813, di Meksiko tahun 1856. Di India secara konstitusional menganut hukum sekular bagi seluruh penduduknya, pasal 44 konstitusi tersebut menyatakan; "Negara harus menciptakan hukum perdata yang seragam bagi warga negara di seluruh India", dan tahun 1955 mengakui segala macam bentuk perkawinan antar kasta. Di Inggris mulai tahun 1860 menerapkan hukum pidana dan perdata secara sekuler.

Sedangkan di dunia Islam proses sekularisasi ini berlangsung pada pertengahan abad ke 19, pada masa Turki Usmani para penguasa menyatakan berlakunya berbagai macam aturan hukum yang mengambil model-model Eropa (hukum Dagang tahun 1850, Hukum Pidana tahun 1858) namun semuanya itu hanya dianggap sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti hukum Islam.

2) Sekularisasi Pendidikan

Pada akhir abad ke 19 negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Inggris berusaha menerapkan pendidikan Barat liberal dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pe-

ngantarnya. Di India tahun 1835 yang beragama Hindu dan Islam pendidikan yang sangat agamis di hapuskan dan diganti dengan kurikulum barat yang sekuler, dan ke Birma tahun 1866. Di Argentina tahun 1884 bahwa pendidikan umum bersifat sekuler, pelajaran agama pada jam-jam belajar di larang.

Di Turki tanggal 3 Maret 1924 mengeluarkan undang-undang tentang "Undang-Undang penyatuan Pendidikan", yang menghapuskan sekolah-sekolah tradisional. Dengan demikian seluruh pendidikan menjadi "duniawi" atau "sekuler dengan synthesis semata-mata melenyapkan salah satu pihak. (Fazlur Rahman, 1982:72). Sementara di Indonesia yang tidak lepas dari perhatian Smith, pada awal abad ke 20 gerakan pembaharuan pendidikan Agama sudah di mulai dengan menerapkan bidang studi sekuler (Ilmu hitung, sejarah, kesusatraan, Geografi) dengan menggunakan pola organisasi modern. Menurut Clifford Geertz, "sekolah-sekolah tradisional (Parokhial - istilah di lingkungan katolik) di suatu negara Islam termasuk Indonesia adalah teman karib kelompok elit modernis yang sekuler, dikatakan teman karib karena memberi jalan dan bahkan mendorong tradisi keagamaan menanggapi dunia modern dengan tidak menolak atau bersikap acuh tak acuh terhadapnya melainkan menyatukan diri sebagai bagian dari padanya" (Smith 1985:144)

Pendidikan merupakan dasar penting dalam perubahan politik dan sosial karena ia menjembatani antara tradisi dan kemodernan. Akbar Muhammad, dalam bab Islam dan integ-

grasi nasional melalui pendidikan di Negeria, membicarakan kepentingan khusus pembaharuan pendidikan di Negeria karena pendidikan merupakan alat utama dalam melaksanakan proses negerianisasi dengan bentuk sekuler (L. Espesito, 1986 :15). Reaksi sekularisasi pendidikan ini besar pengaruhnya dalam perkembangan Islam, bahkan sampai ke Indonesia adalah modernisme pemikiran Islam. Terutama sekali gerakan pembaharuan Muhammad Abduh (1849-1950) yang menganjurkan umat Islam untuk menggemuli pemikiran modern, dan berkeyakinan bahwa dalam taraf akhir pemikiran modern hanya akan membenarkan Islam. Bentuk reaksi semacam ini bukanlah politis sifatnya, melainkan lebih bersifat kultural (Fachry Ali, 1991:90).

3) Sekularisasi Struktur Sosial

Bertolak dari kepincangan sosial dalam masyarakat Hindu, Budha, Katolik maupun Islam pemerintah berusaha mengatur dan mengadakan pembaruan. Bahkan kini kecendrungan ideologis pada suatu tatanan masyarakat menjadi tanggung jawab negara.

Selama abad ke 19 negara merupakan pengatur dan pembaharu dari masyarakat yang semakin tidak sakral. Seperti di India waktu pemerintahan koloni Inggris tahun 1860 menerapkan hukum pidana yang menganut azas struktur masyarakat sekuler, yang sebenarnya azas ini merupakan serangan terhadap sistem kasta tradisional Hindu. Di Amerika Latin dan Spanyol mengeluarkan pernyataan tentang hak-hak asasi

manusia tahun 1974, hingga sekarang pernyataan tersebut tetap memperoleh sambutan negara-negara diseluruh dunia:

4) Sekularisasi perekonomian.

Pada mulanya lembaga-lembaga tradisonal keagamaan lebih kaya dari pada perbendaharaan negara, dengan adanya sistem sedekah dalam Islam, sistem tuan tanah dalam Budha, dan berbagai penumpukan kekayaan dalam gereja. Kaum Liberal berusaha melumpuhkan gereja secara ekonomis dengan berpegang pada landasan politik. Jadi sekularisasi radikal di bidang ekonomi adalah yang paling kentara terutama di negara-negara yang telah mengalami revolusi. Sekarang tampak begitu kentara sebagai dampak ekonomi kapitalis yang berpegang pada modal dan ekonomi sosialis yang berpegang pada nilai kerja.

Adopsi teori atau model pembangunan seperti ini bukan hanya merupakan suatu jalan menjadi barat melainkan telah mensekularisasikan masyarakat atau negara berkembang itu sendiri, sebab dari rangka teori pembangunan dua ideologi ini, yakni kapitalisme dan sosialisme tidak sedikit-pun variabel-variabel agama atau teologis dipertimbangkan sebagai variabel yang bisa berperan dalam pembangunan. (Fachry Ali, 1991:77). Hal ini, sebagaimana yang dikatakan Vernon Pratt yang dikutip oleh Rifyal Ka'bah dalam bukunya "Islam dan Funadamentalisme" (1984:97), dari sini sekularisasi menjadi :

"Ciri dari ekonomi modern yang bergerak tanpa banyak

perhatian terhadap agama, etika, estetika atau pertimbangan prestise. Orientasi dasarnya harus kepada keuntungan yang sebesar-besarnya".

Fenomena semacam ini terutama sekali menimpa masyarakat non Barat yang kapitalis seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Fachry Ali, 1991:25). Sedang sosialisme muncul sebagai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Soviet (Rusia) yang kemudian menjadi model pembangunan negara sosialis lainnya baik di Eropa Timur (Yugoslavia, Rumania, Chekoslovakia, Polandia dan lain-lain), di Asia (Cina), Afrika dan beberapa negara Amerika latin. (Fachry Ali, 1991:57)

5.) Sekularisasi Budaya Politik.

Sidney Verba merumuskan konsep budaya politik itu sebagaimana dikutip Smith (1985:150), sebagai berikut :

"Budaya politik dalam suatu masyarakat terdiri dari sistem keyakinan empirik, lambang-lambang ekspresif dan nilai-nilai yang memberi gambaran tentang situasi dimana kegiatan politik terjadi. Ia menampilkan orientasi subyektif terhadap permasalahan politik".

Sekularisasi budaya politik ini secara garis besar mencakup perubahan nilai-nilai secara berangsur-angsur yang dilakukan oleh elit penguasa dalam mengambil keputusan-keputusan tidak melalui proses persetujuan massa rakyat .

Dan yang menyebabkan terjadinya sekularisasi budaya politik ini adalah runtuhnya secara eksplisit nilai-nilai agama , yang umumnya terjadi pada semua lapisan masyarakat. Kesadaran beragama dan kesakralan tidak mendapat penilaian tinggi lagi dalam masyarakat. Nilai-nilai kebendaan menempati

kedudukan tinggi lebih tinggi dari nilai-nilai ukhrawi; bahkan mulai tumbuh perasaan skeptis (keraguan) terhadap kebenaran atau validitas ajaran agama tradisional.

Peran agama dalam kehidupan secara perlahan diambil alih oleh pemerintah atau negara. Dan pada gilirannya negara mendominasi agama. Negara sekuler, dengan secara terbuka menyerang basis-basis keagamaan dan secara paksa memberlakukan ideologi sekuler terhadap kultur politik. Negara mengambil alih agama untuk mengurangi secara drastis pengaruh agama dan melakukan restrukturalisasi sosial politik tanpa dasar agama. Kasus semacam inilah yang terjadi di Prancis, Rusia, Turki, dan Cina selama periode pergolakan.

Dalam Islam dekonsekrasi (pemberian makna sementara) ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an :

وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما
يرسلنا الا الذكر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون

"Dan mereka berkata ; "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia ini saja, kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa", dan sekali-kali mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanya menduga-duga saja". (Al-Jatsiyah, 45:24)

B. Eksistensi Agama dalam Negara Sekuler.

1. Sekularisasi di dunia Islam

Setelah sekularisme muncul di Eropa di abad pertengahan, tepatnya di Perancis tahun 1789 yang terkenal dengan revolusi Perancis, pengaruhnya mulai merembes ke dunia Timur. Ide sekularisasi muncul pertama kali di dunia Islam, dalam catatan sejarah setelah runtuhnya kerajaan Turki Usmani, muncullah Mustafa Kemal sang penyelamat Turki Usmani dari kehancuran total akibat penjajahan Eropa. Berkat jasanya kemudian Mustafa Kemal mendapat gelar Attaturk (Bapak Turki).

Pembaharuan pertama yang dilakukan Mustafa Kemal ditujukan terhadap bentuk negara. Mustafa Kemal telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran politik Barat bahwa kedaulatan terletak ditangan rakyat. Dalam sidang Majelis Nasional Agung tahun 1920, ide ini di terima majlis. Setahun kemudian disusun konstitusi baru dan fasal (1) menjelaskan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat. Dengan demikian yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan, tetapi rakyat. Dalam sidang Majelis Nasional Agung yang diadakan tahun 1921, golongan Nasionalis menghendaki bentuk Republik, maka dikeluarkanlah amandemen "bentuk negara adalah Republik dan agama negara adalah Islam". Dengan presiden pertama, Mustafa Kemal. Ini berarti ada dua kepala negara

Presiden dan khalifah. Waktu itu Khalifah Abdul Majid disokong oleh golongan Islam Turki dan dunia Islam yang ingin mempertahankan adanya Khalifah bagi umat Islam. Mustafa Kemal melihat bahwa jabatan khalifah juga harus dihapuskan dan soal ini dibicarakan oleh Majelis Nasional Agung bulan Februari 1924. Perdebatan berjalan sengit tetapi akhirnya tanggal 3 Maret 1924 suara Majelis memutuskan penghapusan jabatan Khalifah. Tahun 1928 Mustafa Kemal menghapuskan artikel (2) dari konstitusi 1921 dan menyatakan negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama. Sembilan tahun kemudian sesudah prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam konstitusi di tahun 1937, barulah republik Turki dengan resmi menjadi negara sekuler (Harun Nasution, 1991:149-151). Dengan demikian lahirlah negara sekuler pertama dalam sejarah umat Islam.

Adapun usaha-usaha Kemal Attaturk dalam mensekulerkan Turki, selain penghapusan kesultanan dan kekhalifahan serta membentuk republik Turki sekuler adalah perombakan besar-besaran atas nilai-nilai Islam di zaman keemasan Islam, menutup madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah agama, penghapusan Mahkamah Agama dan melaksanakan hukum Perdata Barat (Swiss), memberikan hak yang sama kepada wanita dengan laki-laki (emansipasi), menghapuskan tempat-tempat pertapaan, menghapuskan huruf Arab dan diganti dengan alfabet latin, Azan dilakukan dalam bahasa Turki, penghapusan pakian-pakaian yang menjadi kebiasaan di zaman

Ottoman seperti Tarbus diganti dengan pantolan dan topi ala Barat, perkawinan dilakukan di catatan sipil, penghapusan perusahaan asing serta mengembalikan ekonomi kepada Turki, dan melaksanakan sekularisme negara dan agama. (Lukman Harun, 1989:43). Lenyap sudah sistem kekhilafahan yang di bangun umat Islam, lambang persatuan umat di bawah satu pemerintahan.

Usaha-Usaha sekularisasi ini tidak saja terjadi di Turki, tetapi hampir diseluruh negara-negara Islam yang menghendaki modernisasi akibat westernisasi yang dilancarkan Barat. Sebagai contoh di Mesir sejak tahun 1952 resmi menjadi republik yang memberlakukan hukum pidana dan perdata sekuler, hanya dalam bidang pembagian waris, perkawinan dan wakaf hukum Islam masih diberlakukan. Juga Irak berbentuk Republik, politik ekonomi didasarkan pada sosialisme, dan peradilan agama hanya menangani masalah-masalah status perorangan dan masalah agama berdasarkan status hukum Islam tradisional. Syria berbentuk Republik, terdapat peradilan agama dalam setiap komunitas agama untuk mengurus masalah, perkawinan perceraian dan harta warisan (Suyuthi, 1994:182)

Pengetrapan sekularisasi di dunia muslim ini adalah tidak lepas dari diri para modernis dalam menerima modernisasi akibat pengaruh westernisasi yang dilancarkan Barat. Pengalaman pahit yang dialami umat Islam dalam menggalang modernisasi, adalah sekularisasi yang di-impor kalangan intelektual muslim selaku reformer dalam dunia Islam dan

bahkan mengeyampingkan nilai-nilai Islam yang dianggap tidak relevan lagi dengan dunia modern. Penolakan Ali Abd Raziq*, atas sistem kekhilafahan umat Islam dengan mengambil sistem politik Eropa dan bahkan menurutnya Islam tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Dengan pernyataannya :

"Bentuk pemerintahan haruslah seperti kemauan Tuhan, Tuhan menyerahkan persoalan pemerintahan dan kebutuhan duniawi kepada akal manusia. Juga tidak perlu ummah dipersatukan secara politik, hal ini sama sekali tidak mungkin, dan sekalipun mungkin, apakah perlu? Tuhan mengadakan perbedaan alamiah berbagai suku dan bangsa disitu ada kompetisi agar peradaban manusia menjadi sempurna"(Jamilah, 1982:204).

Khalid Muhammad Khalid sang pembaharu sosial dan agama di Mesir dengan prinsip sosialismenya sebagai pemecahan-persoalan ekonomi dan juga moral, yang selanjutnya banyak diikuti dan dilaksanakan oleh Presiden Nasher. (Jamilah, 1982:215). DR. Thaha Husain, idola intelegensia Mesir; yang banyak mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan sekuler di universitas Al-Azhar, dengan mempersempit pendidikan agama seperti Fakultas kedokteran, administrasi dagang, pertanian dan teknik (Jamilah, 1982:201). Usaha pembaharuan ini dengan mengambil bentuk sekularisasi sebenarnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan pihak penguasa, sebagaimana Fazlur Rahman mengakui dalam bukunya Maryam Jamilah,

*Syekh Ali Abd. Raziq, sarjana muslim Kairo yang pertama dicatat dalam sejarah sebagai orang yang melancarkan propaganda menentang adanya Khilafah dan menganjur agar umat Islam mengambil sekularisme dan nasionalisme. Dalam bukunya *Islam and the Principles of Government*, adalah hasil final dari atmosfer yang suram penuh pesimisme akibat penjajahan asing.

"Bahwa, hanya melalui politik militerlah rencana kaum sekuler bisa terlaksana dengan sempurna". (1982:146).

Sekularisasi dalam dunia Islam merupakan suatu proses yang cukup rumit dan terasa ganjil adanya. Islam sebagai agama yang kafah (menyeluruh), meliputi seluruh aktifitas jasmani dan rohani, ibadah dan mu'amalah yang harus dibangun dengan latar agama. Dengan fondasi (kontrol) agama maka sekularisasi dalam dunia Islam tidak akan pernah merebak kepermukaan.

Sejarah telah mencatat bahwa umat Islam tidak saja terkena imbas sekularisasi, namun perlu di catat bahwa tokoh-tokoh Islam telah dengan suka rela menerima sekularisasi sebagai sisi sekularisme, dan bahkan menolak konsep Islam seperti apa yang terjadi pada tokoh intelektual mesir Ali Abdur Raziq dengan penolakannya terhadap kekhalifahan yang menurutnya Islam tidak mengatur urusan-urusan kenegaraan.

Dari kasus sekularisasi yang terjadi di dunia Islam sebagaimana kasus Turki sekuler yang mencontoh Barat sebagai akibat westernisasi yang dilancarkan Barat, maka tahapan-tahapan sekularisasi dalam dunia Islam adalah sebagai akibat dari ;

- 1) Semakin lemahnya nilai-nilai kesadaran keagamaan, sehingga dengan mudah sekularisasi merasuk kedalamnya . Dan menurut Nurchalish Madjid segi ini ditandai de-

ngan pencampuradukan segi kehidupan rohani dan segi kehidupan materiel (Nurchalish, 1993:123). Dengan kata lain penonjolan segi-segi kehidupan materiel akan senantiasa merongrong dan memperlemah keinsyafan akan kehidupan rohani (spiritual).

- 2) Munculnya sikap yang menuntut adanya pembenaran secara langsung segi-segi kehidupan materiel dalam ukuran-ukuran formal agama, sebab bagi seorang penganut agama semua kehidupannya harus mendapatkan pembenaran dari agamanya (Nurchalish, 1993:123). Dari sini sekularisasi mulai meringrong kehidupan beragama, dan agama dijadikan sebagai tempat bagi praktek-praktek sekular.
- 3) Tidak adanya alternatif-laternatif yang jitu yang dapat menetralsir serta membendung atau bahkan menolak sekularisasi, sehingga dengan mudah sekularisasi merambah dunia Islam. Pada tahapan ini menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas adalah akibat deislamisasi ⁴⁾ (Al-Attas, 1981:64) yang berakar kuat dalam jiwa kaum muslimin. Dengan kata lain inilah yang menyebabkan hilangnya terapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara, yang mana penerapan nilai-nilai Islam

4) Deislamisasi, adalah tuangan dari konsep-konsep yang berlawanan kedalam jiwa kaum muslimin yang kemudian mengendap dan mempengaruhi pikiran serta penalaran mereka.

merupakan kewajiban setiap muslim sebagai pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

2. Hubungan Negara Sekuler terhadap Agama.

Berbagai dimensi agama itu bukan hanya saling berkait, melainkan juga merupakan refleksi perspektif Islam tentang konsep kehidupan. Kehidupan adalah kesatuan tidak bisa dipisahkan. Adanya diktum Allah, "Udkhuluu fissilmi kaafah" (masuklah ke dalam Islam secara total) berarti suatu dorongan Islamisasi semua aspek kehidupan dalam masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan atas dasar ajaran ajaran Islam (Fachry Ali, 1991:18). Berdasarkan pola inilah Islam membentuk asimilasi kehidupan.

Apabila kita melihat landasan peradaban Barat maka secara teoritis akan terlihat falsafah kehidupannya sebagai berikut :

- 1) Dari sudut pandang metafisis, pada materialisme.
- 2) Dari sudut pandang psikologis, pada sensasionisme (faham serba indrawi). Seni dan modenya membuktikan fakta ini dengan jelas.
- 3) Dari sudut pandang etika pada kemanfaatan dan syahwat
- 4) Dari sudut pandang ekonomi, pada eksploitasi masyarakat manusia yang belum berkembang, tanpa kecuali kapitalisme dan komunisme yang kedua-duanya memperbudak manusia.

5) Dari sudut pandang politik, pada pertentangan ras dan pemisahan berdasarkan warna kulit (Haidar Baqir, 1993:129).

Dari karakteristik di atas nampak jelas nilai-nilai peradaban Barat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan apalagi nilai-nilai agama. Pernyataan yang sifatnya pada nilai-nilai profan semata adalah menjadikan budak budak dunia. Ini jelas kenisbian interaksi antara negara sekuler dan agama menjadikan keduanya saling kontradiksi.

3. Ambivalensi Konsep Negara Sekuler.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas masyarakat Barat gaya hidupnya lebih terfokus pada materialistis dan kepuasan-kepuasan yang sifatnya materi belaka. Dari sinilah sebenarnya kemajuan yang diperoleh masyarakat Barat telah mengalami kegagalan total dan bahkan kehan curan sendi-sendi masyarakat dalam berbagai aspeknya. Penilaian dan penghargaan terhadap manusia lain tidak lebih penghargaan terhadap materi belaka, yang kosong dengan nilai-nilai moral (kerisis moral). Dalam hal ini Mohammad Assad menggambarkan dengan cermat bahwa, dalam transformasi yang seksama itu kehidupan sosial Barat sekarang sudah mengalami moralitas utilitarian baru yang makin lama makin nampak. Segala sifat-sifat baru mengandung arti langsung pada kesejahteraan materiel

masyarakat itu, umpamanya efisiensi teknik, patriotisme rasa kelompok nasional - diangkat dan sering dibesar-besarkan dengan kaburnya nilai-nilainya. Sedang kebajikan-kebajikan yang hingga kini dinilai dari sudut pandangan etika melulu seperti kecintaan anak, kesetiaan dalam perkawinan dengan cepat kehilangan arti pentingnya dalam - karena hal itu tidak memberikan manfaat materiel yang dapat diraba pada masyarakat. Akibatnya ayah Barat makin kehilangan kekuasaan atas anaknya dan secara logis si anak kehilangan respect dari anaknya (Moh. Assad, 1983:82).